

BLT & Lingkungan Hidup

TANGGAL 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Untuk tahun 2008, tema yang ditetapkan adalah "Kick the Habit towards a Low Carbon Economy" (Ubah Kebiasaan Menuju Efisiensi Karbon). Terdapat pesan yang mendalam di balik tema ini, yakni imbauan kepada masyarakat dunia untuk mengubah kebiasaan dari perilaku yang cenderung banyak menghasilkan karbon agar lebih efisien. Tampaknya, tema ini terkait erat *global warming*.

Perubahan perilaku yang mengarah pada aksi prolingkungan adalah buah dari pengetahuan, pemahaman, perhatian, dan kepedulian terhadap masalah lingkungan. Temuan empiris menunjukkan, aksi prolingkungan yang ditandai dengan besarnya anggaran belanja lingkungan dan juga mencerminkan perilaku peduli lingkungan, ternyata searah dengan semakin tingginya pendapatan. Dengan kata lain, semakin sejahtera masyarakat (pendapatan nasionalnya tinggi), akan semakin besar alokasi pengeluarannya untuk belanja lingkungan. Hal itu ditunjang kebijakan yang cukup ketat dan konsisten dalam pelaksanaannya. Alhasil, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tingkat kepedulian, degradasi lingkungan semakin kecil.

Bagaimana jika keadaan yang terjadi sebaliknya? Da-

Oleh Dr. ATIH R. DARIAH

nyangkut kepentingan jangka panjang dan untuk manfaat sosial karena yang lebih mendesak adalah kebutuhan saat ini dan pribadi. Dalam istilah Andersen (1995) kemiskinan meningkatkan *discount rate* sehingga menurunkan insentif untuk konservasi dengan mengurangi *net present value* (NPV) *benefit* yang akan datang.

Hasil penelitian kasus Jawa Barat yang dilakukan penulis dengan menggunakan model ekonometrik, memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa memburuknya kondisi sosial ekonomi akan berdampak pada meningkatnya lahan kritis. Kebijakan menaikkan harga BBM mendorong inflasi ke angka di luar target Bank Indonesia dan mengakibatkan daya beli semakin rendah sehingga dikhawatirkan berdampak buruk pada lingkungan terutama luasan lahan kritis. Pertama, semakin banyak masyarakat yang menjarah kayu untuk dijadikan bahan bakar dan bahkan menjualnya ke penampung ilegal. Kedua, semakin banyak masyarakat yang merambah lahan hutan untuk ditanami sayuran di kemiringan yang rawan longsor.

Mengingat hubungan antara ekonomi dan lingkungan bersifat timbal balik, degradasi lahan tersebut dapat meningkatkan kemiskinan karena degra-

hasil, menimbulkan banjir, deforestasi, dan over eksploitasi air tanah, meningkatkan biaya barang kebutuhan pokok seperti kayu bakar dan air minum.

Hasil simulasi khusus untuk kasus Jabar dapat membuktikan dampak serius dari naiknya lahan kritis per kapita sebesar 1% ternyata seluruh aktivitas ekonomi terganggu, *output* seluruh sektor ekonomi turun. Sektor yang paling terkena dampaknya adalah sektor industri pengolahan yang turun 2,09%, sementara sektor pertanian turun 1,26% dan jasa (0,81%).

Penurunan *output* sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa berdampak pada turunnya produktivitas tenaga kerja di masing-masing sektor. Penurunan produktivitas tenaga kerja di seluruh sektor mengakibatkan Gini Ratio meningkat 0,23%. Menurunnya *output* sektor-sektor ekonomi mengakibatkan ekonomi berkontraksi 1,5%. Hal ini tampak pada PDRB sebagai *output* agregat. Artinya, dampak kenaikan lahan kritis per kapita 1% menurunkan pertumbuhan ekonomi sampai 1,5%, sebuah dampak yang sangat besar. Tidak mengherankan tingkat kemiskinan naik sampai 1,5%. Dengan demikian, masalah lahan kritis lebih baik menjadi agenda prioritas untuk diatasi.

kan dapat mempertahankan daya beli masyarakat miskin. Banyak pakar menyangkan program ini karena dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan. Solusi BLT berada dalam dimensi waktu yang sangat pendek. Lalu apa dan bagaimana solusi yang sebaiknya? Banyak ide yang ditawarkan di antaranya program padat karya terutama pembangunan infrastruktur di perdesaan.

Jika berkehendak, sebenarnya dapat dipadukan antara program pemanfaatan dana kompensasi BBM dengan pembangunan perdesaan termasuk penanganan luasan lahan kritis. Bahwasanya, dana tersebut bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dengan pendekatan pola tanam yang menguntungkan.

Penanganan lahan kritis sebaiknya diperlakukan sebagai lahan bisnis yang terintegrasi multi-*output*, lintas sektor, dan pelaku. Multi-*output*, perlu di-*design* pola tanam terpadu tapi dengan teknik yang tepat dan jenis tanaman yang cocok yang berdasarkan siklusnya ada yang bisa dipanen per tiga bulan, per tahun, dan per 5 tahun. *Output* pertanian diarahkan tidak sebatas sebagai konsumsi langsung, tetapi juga sebagai *input* untuk sektor lainnya sehingga akan mendorong perkembangan ekonomi keseluruhan. Inilah yang dimaksud lintas sektor

ranya subsektor industri makanan dan minuman, subsektor industri barang dari kayu, sektor perdagangan, hotel dan restoran, subsektor jasa swasta perseorangan.

Di sinilah pentingnya kemitraan antara pemerintah, petani dan swasta. Bagaimana pemerintah memfasilitasi terjalinnya hubungan menguntungkan antara perusahaan yang menggunakan *input* dari *output* pertanian, atau dengan perusahaan yang mengonsumsi langsung (supermarket dan *hypermarket*, hotel, dan restoran). Agar kedua pihak tertarik, pemerintah dapat memberikan insentif pajak ke perusahaan dan meyakinkan kualitas *output* pertanian sesuai dengan spesifikasi, dan mendorong petani berproduksi berdasarkan arahan dan binaan para ahli, menjamin *output*nya diterima perusahaan dengan harga yang baik. Para ahli yang berasal dari institusi pendidikan atau riset didukung penuh pemerintah untuk mengembangkan bibit unggul dan teknik produksi serta pascapanen.

Mengamati ragam kebijakan yang pernah digulirkan terkait lahan kritis di dalam maupun di luar kawasan hutan, tipe yang dipilih adalah regulasi melalui UU dan perda dan *engaging the public* seperti implementasi *social forestry* dengan beragam turunannya. Berdasarkan hasil *interview*, yang lebih efektif adalah tipe



BKM

BANTUAN khusus mahasiswa (BKM) akan dikucurkan.

- Kenapa bukan muraikan biaya pendidikan?

Terganggu

PADAM listrik, pelayanan publik terganggu

- Jadi alasan baru ya?

Lansia

RASA hormat kepada lansia memudar

- Bisa kualat loh.

Si Kabayan

dan sekitar hutan.

Bukti lain keberhasilan tipe kebijakan ini adalah seperti yang terjadi di Cianjur yakni kegiatan pendampingan kelompok tani GNRHL oleh LSM, baik sisi pemberdayaannya maupun pembinaan aktivitas kelompok, yakni pembuatan tanaman dan pemeliharaan tanaman. Dengan demikian, tipe kebijakan seperti ini perlu terus dikembangkan dan mendapat dukungan penuh dari seluruh *stakeholders*.***

BLT dan Lingkungan Hidup

Atih R Dariah

Tanggal 5 Juni diperingati sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Untuk tahun 2008 tema yang ditetapkan adalah KICK THE HABIT TOWARDS A LOW CARBON ECONOMY (Rubah Kebiasaan Menuju Efisiensi Carbon). Terdapat pesan yang mendalam dibalik tema ini, yakni himbauan kepada masyarakat dunia untuk merubah kebiasaan dari perilaku yang cenderung banyak menghasilkan carbon agar lebih efisien. Tampaknya penetapan tema ini terkait erat dengan *global warming* yang semakin mengkhawatirkan.

Perubahan perilaku yang mengarah pada aksi pro lingkungan adalah buah dari pengetahuan, pemahaman, perhatian dan kepedulian terhadap masalah lingkungan. Artinya, perubahan kebiasaan tidak terjadi secara mendadak, namun berproses yang terkait erat dengan pengkondisian isu lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Pengkondisian yang dimaksud terkait dengan penetapan kebijakan yang mengatur dan mengarahkan perilaku dalam menjaga lingkungan.

Berdasarkan temuan empiris menunjukkan bahwa aksi pro lingkungan yang ditandai dengan besarnya anggaran belanja lingkungan (*environmental spending*) dan juga mencerminkan perilaku peduli lingkungan, ternyata searah dengan semakin tingginya pendapatan. Dengan lain kata, semakin sejahtera suatu masyarakat (pendapatan nasionalnya tinggi) akan semakin besar alokasi pengeluarannya untuk belanja lingkungan. Hal ini ditunjang pula oleh kebijakan yang cukup ketat dan konsisten dalam pelaksanaannya. Alhasil, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tingkat kepedulian, degradasi lingkungan semakin kecil. Studi Jaekyu Lim (1997) yang berjudul *Economic Growth and Environment : Some Empirical Evidences from South Korea* menunjukkan bahwa untuk kasus SO₂, NO₂, TSP dan BOD di Korea Selatan cenderung semakin rendah seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan adanya regulasi yang ketat di awal 1980-an.

Bagaimana jika keadaan yang terjadi sebaliknya? Dalam kondisi pendapatan sangat rendah akan sangat sulit untuk mengeluarkan belanja lingkungan yang

sifatnya menyangkut kepentingan jangka panjang dan untuk manfaat sosial, karena yang lebih mendesak adalah kebutuhan saat ini dan pribadi. Dalam istilah Andersen (1995) kemiskinan meningkatkan *discount rate* sehingga menurunkan insentif untuk konservasi dengan mengurangi *net present value* (NPV) benefit yang akan datang.

Hasil penelitian kasus Jawa Barat yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan model ekonometrik, memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa memburuknya kondisi sosial ekonomi akan berdampak pada meningkatnya lahan kritis. Terkait dengan kebijakan menaikkan harga BBM beberapa hari yang lalu, telah mendorong inflasi ke angka diluar target Bank Indonesia dan mengakibatkan daya beli semakin rendah, sehingga dikhawatirkan berdampak buruk pada lingkungan terutama luasan lahan kritis.

Dalam kondisi harga BBM meningkat tajam dan lapangan kerja semakin sulit, berdampak pada luasnya lahan kritis mencakup dua aspek. **Pertama**, semakin banyak masyarakat yang menjarah kayu untuk dijadikan bahan bakar dan bahkan menjualnya ke penampung ilegal. **Kedua**, semakin banyak masyarakat yang merambah lahan hutan untuk ditanami sayuran, berarti di kemiringan yang rawan longsor.

Mengingat hubungan antara ekonomi dan lingkungan bersifat timbal balik, degradasi lahan tersebut dapat meningkatkan kemiskinan karena degradasi lingkungan mengurangi stok *natural capital*, sehingga meningkatkan kerentanan. Erosi lahan akan menurunkan hasil dan menimbulkan banjir, deforestasi dan *over* eksploitasi air tanah meningkatkan biaya barang kebutuhan pokok seperti kayu bakar dan air minum.

Hasil simulasi khusus untuk kasus Jawa Barat, dapat membuktikan dampak serius dari naiknya lahan kritis per kapita sebesar 1% ternyata seluruh aktivitas ekonomi terganggu, output seluruh sektor ekonomi turun. Sektor yang paling terkena dampaknya adalah sektor industri pengolahan yang turun sebesar 2,09%, sementara sektor pertanian turun 1,26% dan jasa turun 0,81%. Menarik untuk dielaborasi mengapa sektor industri pengolahan yang terkena dampak terbesar. Pengalaman pahit setiap banjir terutama banjir besar yang terjadi di Bandung Selatan karena meluapnya Sungai Citarum telah merendam area kawasan industri tekstil. Akibat genangan air, mesin-mesin terendam sehingga tidak bisa berproduksi

untuk beberapa hari. Selain itu sarana transportasi untuk mengangkut barang-barang input atau output tidak berfungsi. Kerugian ini nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan kegagalan panen padi dan turunnya produksi sektor kehutanan karena menyangkut hilangnya kesempatan berproduksi.

Penurunan output sektor pertanian, industri pengolahan dan jasa berdampak pada turunnya produktivitas tenaga kerja di masing-masing sektor. Seperti kasus banjir yang merendam beberapa pabrik tekstil di Bandung Selatan terpaksa merumahkan semua karyawannya selama banjir belum surut. Penurunan produktivitas tenaga kerja di seluruh sektor mengakibatkan Gini Ratio meningkat sebesar 0,23%.

Menurunnya output sektor-sektor ekonomi mengakibatkan ekonomi berkontraksi sebesar 1,5%, hal ini nampak pada PDRB sebagai output agregat. Artinya, dampak kenaikan lahan kritis per kapita sebesar 1% menurunkan pertumbuhan ekonomi sampai 1,5%, sebuah dampak yang sangat besar. Tidak mengherankan tingkat kemiskinan naik sampai 1,5%. Dibandingkan dengan masalah lingkungan lainnya, dampak dari meningkatnya lahan kritis per kapita terhadap perekonomian dan kondisi sosial ekonomi jauh lebih besar. Dengan demikian masalah lahan kritis lebih baik menjadi agenda prioritas untuk diatasi.

Munculnya program BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga BBM diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat miskin. Banyak pakar menyayangkan program ini karena dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan. Solusi BLT berada dalam dimensi waktu yang sangat pendek. Lalu apa dan bagaimana solusi yang sebaiknya? Banyak ide yang ditawarkan diantaranya program padat karya terutama pembangunan infrastruktur di perdesaan.

Jika berkehendak sebenarnya dapat dipadukan antara program pemanfaatan dana kompensasi BBM dengan pembangunan perdesaan termasuk penanganan luasan lahan kritis. Bahwasannya, dana tersebut bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dengan pendekatan pola tanam yang menguntungkan.

Penanganan lahan kritis sebaiknya diperlakukan sebagai lahan bisnis yang terintegrasi multi output, lintas sektor dan pelaku. Multi output, bahwa perlu didesign pola tanam terpadu tapi dengan teknik yang tepat dan jenis tanaman yang cocok

yang berdasarkan siklusnya ada yang bisa dipanen per tiga bulan, per tahun dan per 5 tahun. Output pertanian diarahkan tidak sebatas sebagai konsumsi langsung, tapi juga sebagai input untuk sektor lainnya sehingga akan mendorong perkembangan ekonomi keseluruhan. Inilah yang dimaksud lintas sektor, bahwa penanganan dengan metode multi output ini idealnya dikaitkan dengan perkembangan sektor lainnya diantaranya sub sektor industri makanan dan minuman, sub sektor industri barang dari kayu, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sub sektor jasa swasta perseorangan. Prospek sektor-sektor ekonomi ini ke depannya akan tumbuh lebih baik, mengingat permintaan terhadap output sektor ini cenderung meningkat karena terkait jumlah penduduk yang terus bertambah dengan segala kebutuhan dan aktivitasnya.

Di sinilah pentingnya kemitraan antara pemerintah, petani dan swasta. Bagaimana pemerintah memfasilitasi terjalinnya hubungan menguntungkan antara perusahaan yang menggunakan input dari output pertanian, atau dengan perusahaan yang mengkonsumsi langsung (super dan hypermarket, hotel dan restoran). Agar kedua pihak tertarik, pemerintah dapat memberikan insentif pajak ke perusahaan dan meyakinkan kualitas output pertanian sesuai spesifikasi, dan mendorong petani memproduksi berdasarkan arahan dan binaan para ahli, menjamin outputnya diterima perusahaan dengan harga yang baik. Para ahli yang berasal dari institusi pendidikan atau riset didukung penuh pemerintah untuk mengembangkan bibit unggulan dan teknik produksi serta pasca panen.

Mengamati ragam kebijakan yang pernah digulirkan terkait dengan lahan kritis di dalam maupun diluar kawasan hutan, tipe yang dipilih adalah regulasi melalui UU dan Perda dan *engaging the public* seperti implementasi *social forestry* dengan beragam turunannya. Berdasarkan hasil interview, yang lebih efektif adalah tipe *engaging the public* yakni *social forestry* dimana di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Bukti lain keberhasilan tipe kebijakan ini adalah seperti yang terjadi di Cianjur yakni kegiatan pendampingan kelompok tani GNRHL oleh LSM, baik sisi pemberdayaannya maupun pembinaan aktivitas kelompok yakni pembuatan tanaman dan pemeliharaan tanaman. Dengan demikian tipe kebijakan seperti ini

perlu terus dikembangkan dan mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholders.

Ketua Prodi Ilmu Ekonomi UNISBA